

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pencegahan terorisme melalui program kontra-radikalisasi yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur (FKPT Jatim). Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori implementasi dari kebijakan publik dengan pendekatan *street-level bureaucracy* yang digawangi oleh Michael Lipsky untuk melihat bagaimana birokrasi tingkat bawah semacam FKPT Jatim mengimplementasikan kebijakan pencegahan terorisme di daerah dan *community engagement programme* (CEP) guna melihat bagaimana FKPT Jatim berjejaring dan bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* di provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pengurus FKPT Jatim dan observasi pelaksanaan program kontra-radikalisasi di Jawa Timur dengan teknik analisis data menggunakan *discourse analysis* guna melihat kesesuaian wacana yang ada dalam peraturan dengan interpretasi dari tiap pengurus FKPT Jatim yang telah diwawancarai. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan penilaian tentang kesesuaian antara interpretasi hasil wawancara dengan implementasi di lapangan.

Hasil temuan data yang diperoleh melalui penelitian ini memperlihatkan bahwa FKPT Jatim dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan terorisme masih bergantung kepada keputusan dari BNPT meskipun ada usaha untuk melibatkan FKPT Jatim dalam formulasi kebijakan, namun di lapangan, FKPT Jatim memiliki diskresi yang cukup besar dalam menentukan jaringan kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan terorisme.

Kata Kunci: kebijakan pencegahan terorisme, program kontra-radikalisasi, FKPT Jatim

ABSTRACT

This study examines the implementation of terrorism prevention policy through counter-radicalisation programme carried out by Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme of East Java (FKPT Jawa Timur). The theoretical framework used is the theory of implementation of public policy with a *street-level bureaucracy* approach fronted by Michael Lipsky to see how lower-level bureaucracies such as FKPT Jawa Timur implement policies on preventing terrorism in regional; and Community Engagement Programme (CEP) to see how FKPT Jawa Timur build networks and collaborate with various stakeholders in East Java to implement the policies agreed upon at the Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

The research method used is qualitative. The data collection techniques were done through in-depth interviews with several FKPT Jawa Timur board members. As well as observations of the implementation of counter-radicalisation programme in East Java. Discourse analysis is used as data analysis techniques to see whether the discourse in the regulations conforms with the interpretation of each of the FKPT Jawa Timur board members that have been interviewed. This research will produce an assessment to see whether the interpretation of the interview result conforms with the implementation in the field.

The findings of the data obtained through this study indicate that in implementing terrorism prevention policies, FKPT Jawa Timur still depends on the decision of BNPT despite efforts to involve FKPT Jawa Timur in policy formulation, nevertheless, FKPT Jawa Timur has considerable discretion in determining cooperation networks in implementing terrorism prevention policies in the field.

Keywords: Terrorism prevention policy, counter-radicalisation program, FKPT Jatim